

ABSTRAK

Pembuktian menjadi bagian penting dalam acara pidana karena menjadi penentu bersalah atau tidaknya seorang terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan. Dalam proses pembuktian, selain keyakinan hakim terdapat suatu prinsip yang harus terpenuhi agar hakim bisa menjatuhkan putusan, yakni prinsip minimal 2 (dua) alat bukti. Akan tetapi, ada kesulitan dalam memenuhi 2 (dua) alat bukti pada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di ranah privat.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini ialah mengenai pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjabaran terkait pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah *juridis normatif* dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebelumnya telah diatur dalam beberapa undang-undang, namun masih belum terfasilitasi dengan baik. Hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir untuk menjadi landasan hukum bagi penegakan kasus kekerasan seksual termasuk pada korban anak. Proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak seringkali tidak menemukan titik terang karena kurang kuatnya alat bukti sehingga hakim tidak memperoleh keyakinan dari alat bukti yang ada untuk menjatuhkan putusan.

Kata Kunci: Pembuktian, Kekerasan Seksual Terhadap Anak

ABSTRACT

Evidence is an important part of criminal proceedings because it determines the guilt or innocence of a defendant against the acts charged. In the evidentiary process, in addition to the judge's belief there is also a principle that must be fulfilled in order the judge can impose a verdict. However, there are difficulties in fulfilling 2 (two) pieces of evidence in cases of sexual violence against children that occur in the private sphere.

The problems discussed in this legal writing are the regulation of criminal acts of sexual violence against children and the process of proving criminal acts of sexual violence against children. This research aims to provide an explanation related to the regulation of criminal acts of sexual violence against children and to find out and analyze the process of proving criminal acts of sexual violence against children.

The research method used in this research is normative juridical with analytical descriptive research specifications. The type of data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained from literature studies.

The results obtained from this study state that the regulation of criminal acts of sexual violence against children has previously been regulated in several laws, but is still not well facilitated. Until Law of The Republic of Indonesia Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence was present to provide a legal basis for the enforcement of sexual violence cases, including child victims. The process of proving criminal acts of sexual violence against children often does not find a bright spot due to the lack of strong evidence that the judge does not gain confidence from the existing evidence to make a decision.

Keywords: Evidence, Sexual Violence Against Children